
Pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Wisatawan dan Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Restoran di Kota Banjarmasin

Ratu Ayu Nurseptiawan*, M. Rusmin Nuryadin

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

* ratuayu1998@gmail.com

Abstract.

This study aims to measure the strength of the relationship between population, number of tourists, and inflation on restaurant tax revenues in Banjarmasin City. The scope of the research is restaurant tax in Banjarmasin City using multiple linear regression analysis with quantitative descriptive data collection techniques taken from secondary data sourced from the literature and official data.

The results of this study show that there is a joint influence between the number of residents, the number of tourists, and inflation on restaurant tax revenues in Banjarmasin City. While partially only the population has a positive and significant influence.

Keywords: Population; Number of Tourists; Inflation; Restaurant tax

Abstrak.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antara jumlah penduduk, jumlah wisatawan, dan inflasi terhadap penerimaan pajak restoran di Kota Banjarmasin. Ruang lingkup penelitian adalah pajak restoran di Kota Banjarmasin menggunakan analisis regresi linear berganda dengan teknik pengumpulan data deskriptif kuantitatif yang diambil dari data sekunder bersumber dari literatur-literatur (kepuustakaan) serta data-data resmi.

Hasil penelitian ini yaitu terdapat pengaruh secara bersama-sama antara jumlah penduduk, jumlah wisatawan, dan inflasi terhadap penerimaan pajak restoran di Kota Banjarmasin. Sedangkan secara parsial hanya jumlah penduduk yang memiliki pengaruh positif dan signifikan.

Kata Kunci: Jumlah Penduduk; Jumlah Wisatawan; Inflasi; Pajak Restoran

PENDAHULUAN

Kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual merupakan kegiatan yang berkesinambungan dan terus menerus berlangsung untuk tujuan meningkatkan Pembangunan Nasional NKRI. Dalam mewujudkan tujuan tersebut tentu banyak hal yang perlu diperhatikan mengenai pembiayaan pembangunan. Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya dengan menimbulkan kemandirian suatu bangsa ini, salah satunya dengan usaha menggali sumber dana yang asalnya dari dalam negeri kita sendiri. Dimana yang menjadi sumber dimaksud adalah pajak.

Pajak adalah kewajiban berupa sokongan/andil yang disetorkan oleh wajib pajak atau orang yang membayar pajak. Pajak itu sendiri digolongkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Dimana hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah kita sendiri dengan bahkan tanpa balas jasa atau imbalan yang ditunjukkan secara langsung.

Melihat pernyataan diatas maka bisa kita ketahui bahwa pajak daerah beserta retribusi daerah bagian dari komponen terbesar dalam penyumbang pendapatan asli daerah. Kesejahteraan masyarakat dalam bentuk pembangunan merupakan hasil yang dibayarkan oleh pemerintah dari pembayaran pajak itu sendiri.

Kota Banjarmasin dijuluki kota seribu sungai adalah ibu kota dari Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu, secara geografis letak kota Banjarmasin sangat strategis karena letak kota

Banjarmasin hampir berada di tengah-tengah Indonesia. Dengan adanya letak yang strategis ini, Kota Banjarmasin memiliki banyak keunggulan baik dari segi tempat wisata maupun makanan khasnya. Selain itu, karena terkenal dengan sungainya, kota ini menjadikan sungainya sebagai tempat wisata. Dengan banyaknya keanekaragaman yang dimiliki kota Banjarmasin, banyak masyarakat baik dari dalam/luar kota bahkan wisatawan mancanegara tertarik untuk berkunjung dan mencicipi makanan khas kota Banjarmasin.

Setiap tahunnya Kota Banjarmasin selalu berkembang khususnya di sektor pembangunan karena kota Banjarmasin memiliki potensi yang besar untuk menjadi kota pariwisata. Dalam proses pembangunan ini tentunya harus memiliki dana yang cukup untuk membiayai pembangunan yang akan dilakukan, serta harus adanya pengelolaan anggaran dana yang baik agar pembangunan tercapai. Salah satu sumber dana guna menyelenggarakan pembangunan tersebut adalah dari pendapatan pajak daerah.

Pada tabel 1.1 berikut bisa dilihat representasi pendapatan pajak daerah dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin.

Tabel 1. 1 Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010-2019

Tahun	Pajak Daerah (Juta Rupiah)	PAD (Juta Rupiah)	Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD (%)
2010	42.962	80.510	53%
2011	73.061	118.554	62%
2012	89.610	138.086	65%
2013	111.508	167.313	67%
2014	134.413	216.427	62%
2015	133.833	225.821	59%
2016	156.819	247.258	63%
2017	180.620	324.977	56%
2018	190.036	277.873	68%
2019	215.643	330.718	65%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin 2019

Pada tabel 1.1 yang terlihat diatas dihasilkan angka penerimaan pajak daerah selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya dari tahun 2010 hingga 2019, meskipun angka presentase kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah naik turun, selain itu kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah selalu diatas 50% atau setengah dari Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin merupakan pendapatan Pajak Daerah di Kota Banjarmasin.

Salah satu pajak daerah yang sangat mendominasi besar dalam pendapatan asli daerah ialah pajak restoran. Pajak restoran merupakan salah satu dari jenis pajak kabupaten/kota yang memerankan *role* yang penting pada salah satu sumber pendapatan pajak daerah. Dikarenakan besarnya pendapatan pajak restoran yang dicapai oleh pemerintah daerah, pada tahun 2010-2019 perkembangan jumlah restoran/rumah makan di kota Banjarmasin selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selain menyumbangkan pendapatan PAD yang selalu bertumbuh dan menunjukkan eskalasinya, restoran bisa menyediakan atau membuka lapangan dan kesempatan pekerjaan yang luas bagi masyarakat sekitar Banjarmasin dan juga bisa menurunkan tingkat pengangguran di kota Banjarmasin.

Fasilitas berupa dorongan kepada daerah, kemudahan, dan bantuan untuk mewujudkan otonomi daerah agar bisa dilakukan dengan efektif juga efisien dan berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di peraturan merupakan kewajiban yang harus diberikan pemerintah dengan adanya pajak daerah.

Tabel 1. 2 Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010-2019

Tahun	Pajak Restoran (Rupiah)	Pajak Daerah (Rupiah)	Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD (%)
2010	11,599,002,679.00	42,962,620,588.00	27.00%
2011	16,044,457,248.95	73,061,359,183.95	21.96%
2012	20,523,601,254.00	89,610,952,329.00	22.90%
2013	24,389,872,709.00	111,508,975,587.40	21.87%
2014	31,002,960,344.00	134,413,962,588.00	23.07%
2015	31,000,829,355.00	133,833,372,198.00	23.16%
2016	33,928,227,132.00	156,819,158,772.00	21.64%
2017	38,271,555,758.00	180,620,391,419.00	21.19%
2018	44,711,266,955.00	190,036,401,787.00	23.53%
2019	54,860,060,087.70	215,643,985,952.70	25.44%

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin 2019

Dari hasil data diatas bahwa terjadi perkembangan jumlah restoran setiap tahunnya walaupun persentase realisasi penerimaan pajak restoran ada terjadi penurunan namun penerimaan pajak restoran selalu meningkat setiap tahunnya. Dari peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah pajak restoran tersebut. Adapun hal-hal yang dimaksud yaitu jumlah penduduk, jumlah wisatawan dan inflasi. Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis terdorong melaksanakan studi yang berjudul “Pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Wisatawan dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Restoran di Kota Banjarmasin”.

Pokok permasalahan dari studi ini diantaranya: (1) Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Wisatawan dan Inflasi terhadap penerimaan pajak restoran di Kota Banjarmasin tahun 2010-2019 secara simultan? (2) Bagaimana hubungan antara Jumlah Penduduk, Jumlah Wisatawan dan Inflasi terhadap penerimaan pajak restoran di Kota Banjarmasin tahun 2010-2019 secara parsial?

Adapun tujuan dalam studi ini diantaranya: (1) Untuk membuktikan dan mengkaji pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Wisatawan dan Inflasi terhadap penerimaan pajak restoran di Kota Banjarmasin tahun 2010-2019 secara simultan (2) Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Wisatawan dan Inflasi terhadap pendapatan pajak restoran di Kota Banjarmasin tahun 2010-2019 secara parsial.

KAJIAN PUSTAKA

Pajak Daerah

Pajak daerah adalah suatu jenis pungutan yang didapatkan dari pendapatan pajak yang didalamnya digolongkan antara pajak provinsi serta pajak kabupaten/kota dimana pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah atau pejabat daerah setempat dan kemudian hasil tersebut digunakan dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan daerah yang didasari oleh undang-undang yang berlaku.

Dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 mengenai PDRD, yang pada biasanya disebut pajak merupakan pungutan yang dibentuk dalam kontribusi wajib kemudian diberikan ke daerah yang terutang oleh seseorang pribadi atau badan yang sifatnya sendiri mengikat serta wajib menurut peraturan undang-undang yang berlaku, kemudian hal tersebut masyarakat tidak memperoleh pendapatan secara langsung dan pendapatan tersebut dimanfaatkan guna kepentingan serta hajat kemakmuran rakyat orang banyak bagi daerah.

Pajak Restoran

Pengertian Restoran

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 22 dan 23, pajak restoran ialah pungutan karena diperolehnya atas jasa/servis yang disiapkan oleh restoran. Disamping itu yang diartikan dari restoran itu sendiri merupakan sarana atau wadah yang menyediakan berbagai jenis makanan dan minuman dengan dipungutnya sejumlah imbalan. Hal tersebut meliputi rumah makan, bar, kafetaria, warung, kantin, dan sejenisnya tercakup juga jasa boga/katering.

Jenis-Jenis Restoran

- a) *Formal Dinning room* merupakan *high class restaurant* atau restoran dengan kelas tinggi yang diciptakan sedemikian rupa menjadi eksklusif yang membuat pelanggannya hanya tamu-tamu tertentu dapat menikmati hidangan disana.
- b) *Informal Dinning Room* merupakan restoran dengan sifat tidak formal atau lebih ke santai yang didalamnya dapat dinikmati oleh tamu dari kelas bawah hingga atas.
- c) *Specialities restoran* merupakan restoran dengan menyediakan makanan atau masakan khusus dari suatu negara ataupun bahan pokok khusus dengan ciri khasnya tersendiri.

Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran

Pajak restoran yang ada di Indonesia saat ini pemungutannya menurut dengan fundamental norma serta kaidah hukum yang kuat dan jelas. Maka dari itu, kemudian wajib dituruti dan ditaati oleh seluruh pihak-pihak yang terikat didalamnya. (Marihor P. Siahaan, 2016)

Hal-Hal yang Mempengaruhi Pendapatan Pajak Restoran

Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan semua orang atau masyarakat atau individu yang berdomisili atau memiliki alamat tinggal pada wilayah geografis dengan batas yang telah ditetapkan republik indonesia selama jangka waktu 6 bulan atau lebih atau mereka yang bertempat tinggal disuatu daerah dalam periode kurang dari 6 bulan namun memiliki tujuan untuk berdomisili di sekitaran wilayah RI. (Badan Pusat Statistika)

Perkembangan penduduk yang begitu cepat tidak termasuk sebagai penghalang atau penghambat bagi tumbuhnya suatu pembangunan ekonomi. Pertama kita lihat dari sisi permintaan (*Demand side*), penduduk bekerja menjadi seorang konsumen dan kita lihat dari sisi penawaran (*Supply side*), penduduk bekerja menjadi seorang produsen. Dikarenakan itulah kemajuan serta pertumbuhan penduduk bukan dijadikan sebagai penghalang atau kegagalan dalam membangun perekonomian suatu wilayah, jika penduduk suatu wilayah mempunyai peranan sangat besar untuk menghasilkan serta menyerap hasil produksi yang diperoleh suatu wilayah. Maka tingkat kemajuan serta perkembangan penduduk suatu wilayah yang besar akan diikuti oleh tingkat pendapatan yang besar juga. Menurut hal tersebut kita ketahui bahwa pertumbuhan atau perkembangan jumlah penduduk suatu wilayah akan memiliki pengaruh terhadap banyaknya wajib pajak guna menyetor uang suatu pungutan/pajak daerah di suatu wilayah.

Dalam rangka suatu pemenuhan bahkan pemuasan kebutuhan hidup seseorang maka penduduk melakukan permintaan atas sesuatu barang. Melalui meningkatnya jumlah besaran penduduk. Sehingga kebutuhan penduduk akan barang dan jasa sebagai pemenuhan kebutuhan kemudian menunjukkan eskalasi(kenaikan). Pertambahan atau perkembangan jumlah besaran penduduk suatu wilayah yang tidak diiringi juga dengan penambahan peluang kerja, hal tersebut memicu dalam hal meningkatnya pengangguran suatu wilayah (Sukirno, 2005).

Setiap bertambahnya jumlah penduduk suatu wilayah maka akan membuat pekerjaan perekonomian suatu wilayah semakin berkembang pesat. Seperti yang kita ketahui, penduduk akan melakukan kegiatan konsumsi dalam rangka memenuhi kebutuhan. Dengan

bertambahnya tingkat konsumsi penduduk menyebabkan pembentukan usaha baru yang terus berkembang dan mempengaruhi penerimaan pajak restoran.

Jumlah Wisatawan

Menurut UU No. Tahun 2009 pasal 1 wisata adalah suatu hal yang dikerjakan oleh seseorang maupun segerombol orang dan dijadikan sebagai perjalanan dengan mendatangi tempat tertentu dengan tujuan rekreasi atau sekedar jalan-jalan, pengembangan diri pribadi seseorang atau meninjau suatu keistimewaan magnet wisata yang didatangi dengan tujuan waktu yang singkat atau temporer. Sementara wisatawan ialah orang atau manusia yang melaksanakan wisata ke wilayah luar domisilinya.

Wisatawan mancanegara (wisman) adalah setiap orang atau pengunjung yang berkunjung di suatu negara di bumi di luar dari domisilinya sendiri dengan dimotivasi oleh satu maupun beberapa kebutuhan atau keinginan orang tersebut tanpa maksud mendapatkan penghasilan atau gaji pada tempat yang dikunjunginya serta berapa lama kedatangan orang yang terdaftar tidak lebih dari 12 bulan.

Salah satu cara menumbuhkan penerimaan serta kelancaran keseimbangan pada masyarakat daerah setempat secara implisit atau eksplisit menggunakan dampak berganda dengan belanja orang yang berwisata pada daerah tujuan wisatanya juga (*multiplier effect*). Daerah pariwisata tentunya dapat meningkatkan pendapatan wilayahnya melalui daya jual barang dan jasa, seperti restoran, pramuwisata, hotel, dan hal-hal yang berbau mengenai cenderamata. Maka dari itu, pariwisata tentunya wajib diolah sebagai substitusi untuk melaksanakan suatu profitabilitas yang besar untuk suatu daerah. (Spillane, 1987).

Inflasi

Inflasi adalah suatu keadaan dari perekonomian bangsa atau negara yang mana akan ada kecenderungan kenaikan suatu harga-harga serta jasa dalam waktu yang panjang. Dimana hal tersebut merupakan akibat dari ketidak seimbangan aliran uang dan barang suatu wilayah (Badan Pusat Statistik).

Dapat kita perhatikan hal berikut yang merupakan penyebab dari terjadinya inflasi suatu wilayah:

1. Peningkatan suatu permintaan (*demand*)

Inflasi muncul dari akibat peningkatan suatu permintaan dari masyarakat. Dimana peningkatan permintaan akan barang dan jasa tertentu merupakan salah satu bagian hal yang menjadi penyebab dari terjadinya inflasi itu sendiri. Hal tersebut tentunya terjadi akibat dari kebutuhan seseorang akan suatu barang dan jasa tidak berbanding lurus dengan tingginya permintaan masyarakat. Disamping itu peningkatan suatu permintaan barang yang akan diekspor keluar negeri dan peningkatan suatu permintaan perbelanjaan pemerintah serta pihak swasta menjadi salah satu faktor penyebab dari terjadinya suatu inflasi.

2. Peningkatan biaya suatu produksi

Pada saat permintaan akan suatu barang tertentu yang sedang tinggi sedangkan bahan baku yang ingin diolah juga menjadi langka maka barang tersebut akan menjadi jauh lebih mahal dibandingkan dengan sebelumnya, disamping itu perusahaan tentunya harus tetap mengolah produksi dari barang yang diminta oleh suatu pasaran sehingga produksi yang dilakukan tersebut menjadi macet. Bukan hanya itu, naiknya harga suatu bahan bakar serta upah dari para buruh tentunya juga menjadi kendala bagi suatu perusahaan produsen, yang membuat mereka tidak bisa memenuhi permintaan pasar.

3. Tingginya suatu peredaran uang

Inflasi tentunya disebabkan oleh tingginya suatu peredaran uang yang berputar dimasyarakat suatu wilayah, yang membuat menjadi lebih banyak dari yang dibutuhkan masyarakat. Hal tersebut terjadi saat jumlah dari barang yang ada pasaran sedang tetap, tetapi uang beredar yang ada di masyarakat mencapai dua kali lipat. Maka hal tersebut menjadikan kenaikan pada harga suatu barang tersebut, bahkan bisa jadi mencapai 100%. Ketidakseimbangan arus jumlah

suatu barang dan uang yang beredar pada masyarakat inilah yang menyebabkan terjadinya inflasi.

Laju inflasi tentunya juga memiliki dampak bagi suatu penerimaan pada pajak restoran, laju inflasi memberikan efek dari berkurangnya suatu daya beli masyarakat dan menjadikan turunya nilai dari sebuah mata uang, yang menjadi penyebab sebagai berkurangnya minat dari seseorang untuk belanja di restoran, serta hal tersebut menyebabkan keuntungan yang diperoleh pengelola pajak restoran menjadi turun yang membuat penerimaan dari pajak restoran juga akan mengikuti menurun.

Penelitian Terdahulu

Resti Sylvianur(2020) yang menganalisis mengenai kontribusiserta efektivitas pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Banjarmasin yang menghasilkan laju pertumbuhan dari pajak restoran Kota Banjarmasin tiap tahunnya mengalami fluktuasi, yang memiliki rata-rata 14,17% perhitungan terendah sendiri terjadi pada tahun 2015 sebesar – 0,01% dan tertinggi pada tahun 2014 sebesar 27,11% dengan katagori tidak berhasil.kontribusi pajak restoran kepada PAD dengan rata-rata 14,04 % dari paling rendah yaitu pada tahun 2017 sebesar 11,78% dan yang paling tinggi pada tahun 2018 sebesar 16,09% dengan katagori kurang. Tidak terlihat besar. Untuk efektifitas pajak restoran dengan rata-rata 109,13% dari data yang paling tinggi pada tahun 2013 sebesar 115,59% dengan katagori sangat efektifitas.

Suardi Jiuhardi Muliati (2016) yang menganalisis faktor-faktor dari penerimaan serta potensi pajak hotel Kota Samarinda. Dimana menghasilkan jumlah wisatawan dan jumlah hotel kota samarinda memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penerimaan dari pajak hotel Kota Samarinda.

Ahmad Haris (2018) yang menganalisis berbagai faktor yang memiliki pengaruh terhadap penerimaan dari pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Gowa. Realisasi pajak bumi dan bangunan Kabupaten Gowa yang terjadi pada tahun 2013-2017 mengalami kenaikan serta penurunan pada tahun 2013-2014 terjadi kenaikan sebanyak Rp. 110.775 dari target yang telah di tentukan. Pada tahun 2015 target yang di tentukan sebanyak Rp. 287.538.444 dan Rp. 77.625.909. Dari hasil tersebut dapat kita lihat bahwa kurang maksimalnya pencapaian realisasi pajak bumi dan bangunan di Kab. Gowa. Oleh karena itu pemerintah daerah harus lebih mendukung berbagai upaya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi permintaan pajak bumi dan bangunan sehingga hal tersebut mendapatkan hasil yang diinginkan berupa peningkatan realisasi sesuai target yang telah di tentukan.

METODE

Ruang Lingkup Objek Penelitian

Penelitian ini ditulis dan diteliti untuk memahami Pengaruh dari Jumlah Penduduk, Jumlah Wisatawan, dan Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Restoran. Ruang lingkup yang diteliti adalah Pajak Restoran di Kota Banjarmasin dalam periode 2010-2019.

Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian yang dibuat ini ialah studi yang dilaksanakan menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dan dengan memakai data sekunder. Penggunaan data dari studi ini ialah dengan data runtun waktu atau (*time series*) tahunan. Data ini berupa data Penerimaan Pajak Restoran, Jumlah Penduduk, Jumlah Wisatawan, dan Inflasi di Kota Banjarmasin tahun 2010 – 2019.

Tempat / Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2010-2019.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

- Pajak Restoran adalah suatu pungutan yang dibayarkan oleh seseorang dikarenakan adanya pelayanan atau jasa yang tersedia di restoran di Kota Banjarmasin. Restoran sebagai sarana atau wadah yang menyediakan berbagai jenis makanan dan minuman dengan dipungutnya sejumlah imbalan atau biaya yang diukur dalam satuan rupiah.
- Jumlah Penduduk adalah beraneka ragamnya suatu penduduk yang berdomisili di kota banjarmasin serta memiliki tanda penduduk kota banjarmasin, yang diukur dalam satuan jiwa pertahun.
- Jumlah Wisatawan adalah banyaknya orang yang berwisata yang datang tiap tahun ke banjarmasin pada periode tertentu dikarenakan oleh satu atau beberapa keperluan yang diukur dalam satuan jiwa.
- Inflasi adalah suatu keadaan dari perekonomian sebuah negara yang mana ada kecenderungan pada kenaikan harga-harga dan jasa pada waktu yang lama dan diukur dalam satuan persen.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam mendapatkan berbagai macam informasi sekaligus data yang kemudian diolah didalam studi ini, maka akumulasi informasi sekaligus data ini dilaksanakan menggunakan dua cara, yaitu: dokumentasi ialah suatu akumulasi data yang dilakukan menggunakan cara dokumentasi, teknik pengumpulan data dengan meninjau beberapa dokumen-dokumen dengan catatan-catatan mengenai Pajak Restoran, Jumlah Penduduk, Jumlah Wisatawan, dan Inflasi Kota Banjarmasin. Kepustakaan ialah akumulasi data dari banyaknya sumber-sumber buku serta jurnal yang relevan terkait kasus yang hendak dikaji dan yang telah dianalisis dan diulas oleh peneliti.

Teknik Analisis Data

Bentuk umum yang dihasilkan dari fungsi penerimaan pajak restoran sebagai berikut:

$$\ln Y = \alpha + \beta_1 \ln X_1 + \beta_2 \ln X_2 + \beta_3 \ln X_3 + e$$

Keterangan:

$\ln Y$ = Logaritma Natural Dari Penerimaan Pajak Restoran Kota Banjarmasin (rupiah)

$\ln X_1$ = Logaritma Natural Dari Jumlah Penduduk Kota Banjarmasin (jiwa)

$\ln X_2$ = Logaritma Natural Dari Jumlah Wisatawan Kota Banjarmasin (jiwa)

$\ln X_3$ = Logaritma Natural Dari Inflasi Kota Banjarmasin (%)

α = Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$ = Koefisien regresi

e = Kesalahan gangguan

HASIL DAN ANALISIS

Analisis Regresi Linear Berganda

Persamaan regresi bisa diamati dari tabel hasil uji coefisient dengan menggunakan output SPSS versi 25 pada variabel jumlah penduduk, jumlah wisatawan, dan Inflasi terhadap pendapatan pajak restoran Kota Banjarmasin. Berdasarkan tabel hasil penelitian, bisa diamati dengan hasil koefisien regresi (β) di atas, maka didapatkan persamaan regresi seperti:

$$\ln Y = -131,125 + 11,490 \ln X_1 + 0,070 \ln X_2 + 0,103 \ln X_3$$

Hasil dari persamaan regresi di atas bisa dipahami dengan:

Nilai koefisien β_0 sebesar -131,125 jika variabel jumlah penduduk (X_1), jumlah wisatawan (X_2), dan inflasi (X_3) atau $X = 0$, maka angka penerimaan pajak restoran sebesar -131,125.

Nilai koefisien $\beta_1 = 11,490$. Artinya setiap terjadi eskalasi (kenaikan) jumlah penduduk sebesar 1% akan mengakibatkan peningkatan pendapatan pajak restoran sebesar 11,490% menggunakan pengaruh yang signifikan. Koefisien ditaksir positif berarti terjadi hubungan positif antara angka jumlah penduduk dan angka penerimaan pajak restoran karena semakin naik angka jumlah penduduk maka angka penerimaan pajak restoran semakin meningkat.

Nilai koefisien $\beta_2 = 0,070$. Artinya setiap terjadi peningkatan jumlah wisatawan sebesar 1% akan mengakibatkan peningkatan penerimaan pajak restoran sebesar 0,070% dengan pengaruh yang tidak signifikan. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara angka jumlah wisatawan dan angka penerimaan pajak restoran karena semakin naik angka jumlah wisatawan maka angka penerimaan pajak restoran semakin menunjukkan peningkatan.

Nilai koefisien $\beta_3 = 0,103$. Berarti tiap-tiap terjadi kenaikan Inflasi sebesar 1% akan berakibat pada kenaikan penerimaan pajak restoran sebesar 0,103% dengan pengaruh yang signifikan. Koefisien ditaksir positif (+) berarti adanya hubungan positif antara angka Inflasi dan angka penerimaan pajak restoran karena semakin naik angka Inflasi maka angka penerimaan pajak restoran semakin menunjukkan peningkatan juga.

Hasil Pengujian Hipotesis

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Berdasarkan tabel hasil penelitian dapat dijelaskan dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05 diperoleh F hitung sebesar 63,128 dengan F tabel sebesar 8,89 dengan demikian F hitung > F tabel dengan tingkat signifikansi yang diperoleh $0,000 < 0,05$ sehingga ada pengaruh secara simultan (bersama-sama) jumlah penduduk, jumlah wisatawan dan Inflasi terhadap penerimaan pajak restoran di Kota Banjarmasin.

Uji Signifikansi Parsial (Uji T).

Pada pengujian jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak restoran diketahui nilai signifikan $0,001 < 0,05$ dan nilai t hitung $6,095 > t$ tabel 2,447 maka H_0 ditolak dan H_a diterima menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak restoran di Kota Banjarmasin.

Pada pengujian jumlah wisatawan terhadap penerimaan pajak restoran diketahui nilai signifikan $0,658 > 0,05$ dan nilai t hitung $0,465 < t$ tabel 2,447 maka H_0 diterima dan H_a ditolak menyatakan bahwa jumlah wisatawan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak restoran di Kota Banjarmasin.

Pada pengujian Inflasi terhadap penerimaan pajak restoran diketahui nilai signifikan $0,450 > 0,05$ dan nilai t hitung $0,807 < t$ tabel 2,447 maka H_0 diterima dan H_a ditolak menyatakan bahwa PDRB berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak restoran di Kota Banjarmasin.

Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Restoran

Dilihat dari data penelitian jumlah penduduk sudah baik yang artinya sebagai subjek pajak, dimana penduduk yang dimaksud memiliki penghasilan yang baik sehingga penduduk akan mengeluarkan penghasilannya untuk belanja di restoran secara langsung membayar pajak. Semakin tinggi jumlah penduduk Kota Banjarmasin maka penerimaan pajak restoran akan semakin bertambah.

Pengaruh Jumlah Wasatawan terhadap Penerimaan Pajak Restoran

Pada data dihasilkan jumlah wisatawan tidak berpengaruh secara signifikan yang artinya wisatawan yang berkunjung ke Kota Banjarmasin tidak seluruhnya makan di restoran yang ada di Kota Banjarmasin. Hal tersebut dikarenakan wisatawan yang berkunjung ke Kota Banjarmasin hanya singgah atau tidak untuk makan. Selain itu wisatawan menginap di hotel dimana mereka sudah mendapatkan makan pagi dari restoran yang masuknya bukan ke penerimaan pajak restoran.

Pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Restoran

Ketidaksesuaian dengan hipotesis yang menyatakan bahwa inflasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Restoran karena laju inflasi hanya akan menyebabkan berkurangnya daya beli masyarakat ditingkat menengah kebawah namun berbeda dengan masyarakat tingkat tinggi yang terbiasa dengan sifat konsumtif tinggi dan tidak mempengaruhi penerimaan Pajak Restoran yang mayoritas dinikmati oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Inflasi yang ada di Kota Banjarmasin adalah kenaikan inflasi bukan penurunan inflasi.

Kenaikan inflasi terlalu kecil dan bukan pada bahan makanan sehingga hasilnya positif dan tidak signifikan. Meskipun terjadi inflasi masyarakat Kota Banjarmasin tetap makan di restoran.

PENUTUP

Implikasi Hasil Penelitian

Implikasi dari hasil penelitian ini menemukan bahwa hanya jumlah penduduk yang memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak restoran di kota Banjarmasin berdasarkan hasil uji parsial.

Keterbatasan Penelitian

Pada proses pembuatan penelitian tentang pengaruh jumlah penduduk, jumlah wisatawan, dan inflasi terhadap penerimaan pajak restoran kota Banjarmasin ini terdapat beberapa keterbatasan penelitian yaitu pembahasan hanya berfokus pada 3 variabel saja kemudian masih ada variabel lain yang berpengaruh dan belum dikaji pada penelitian ini. Variabel lainnya yang mungkin juga memiliki pengaruh diantaranya jumlah hotel, PDRB, penduduk perbatasan Kota Banjarmasin, dan lainnya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis tentang pengaruh jumlah penduduk, jumlah wisatawan, dan Inflasi terhadap penerimaan Pajak restoran di Kota Banjarmasin selama kurun waktu sepuluh tahun dari tahun 2010 sampai dengan 2019 bisa ditarik garis besar kesimpulan, yaitu : (1) Jumlah penduduk, jumlah wisatawan, dan inflasi secara simultan memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak restoran di Kota Banjarmasin. (2) Jumlah penduduk memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak restoran Kota Banjarmasin. (3) Jumlah wisatawan memiliki pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan terhadap penerimaan pajak restoran Kota Banjarmasin. (4) Inflasi memiliki pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan terhadap penerimaan pajak restoran Kota Banjarmasin.

Saran

Menurut uraian kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan saran-saran yakni: (1) Pemerintah/pejabat daerah bisa meninjau target pajak restoran supaya realisasi pemungutan pajak restoran dapat menunjukkan eskalasi atau peningkatan setiap tahunnya. (2) Memperbanyak acara atau festival budaya agar dapat menarik perhatian wisatawan domestik ataupun internasional untuk berkunjung ke Banjarmasin serta mengadakan doorprize atau hadiah yang memikat agar memberikan magnet dan motivasi bagi masyarakat untuk selalu patuh dalam menyetorkan pajak dengan tepat waktunya. (3) Wajib pajak pada restoran di kota Banjarmasin disarankan untuk selalu senantiasa dalam mengikuti peraturan dan ketentuan mengenai penyetoran pajak restoran kota Banjarmasin yang sudah diterapkan pada waktu yang sesuai dan tidak menahan-nahan dalam penyetorannya, karena kerja sama kalian sebagai pembayar pajak merupakan perwujudan dari keikutsertaan kalian sebagai warga dalam menopang kesuksesan pembangunan daerah kota Banjarmasin serta penyelenggaraan pemerintahan. (4) Bagi peneliti selanjutnya diperlukan bisa meluaskan penelitian ini menggunakan memperbanyak hal-halapa saja yang bisa meningkatkan pajak restoran di Kota Banjarmasin.

BIBLIOGRAPHY

- Ali, S. H. (2018). Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Bitung. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(5), 143-151.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penulisan: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistika Provinsi Kalimantan Selatan. (n.d.). Retrieved from <https://kalsel.bps.go.id/>

-
- Firdaus, M. I. (2019). Analisis Potensi Dan Efektifitas Pajak Hotel Serta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel Di Kota Bandung. *Substansi*, 3(2), 154-166.
- Ghozali, I. (2006). *Ekonometrika Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N. (2007). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Erlangga.
- Halim, A. (2004). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Jogjakarta: UPP AMP YKPN.
- Indra Efendi Rangkuti, d. (2018). *Perpajakan Indonesia*. Medan: MADENATERA.
- Lubis, I. (2010). *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Pandiangan, L. (2014). *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Erlangga.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, M. P. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, R. (1990). *Asas Dan Dasar Perpajakan I, Cetakan Keempat*. Bandung: Eresco.
- Suardi. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan potensi pajak hotel. *JIEP (Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman)*, 1(1), 53-61.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2000). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Waluyo, W. B. (2003). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ziski, A., Wahyudi, H., & Dalimunthe, M. I. (2016). *Perpajakan*. Medan: Madenatera.